

Ekonomi Politik Kebijakan Perdagangan Era Prabowo: Intervensi Pasar Dalam Program Swasembada Pangan

Armin Rahmansyah Nasution¹ Muhammad Alhasymi Matondang² Mentari Syahputri Purba³

Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3}

Email: armin@unimed.ac.id¹ alhasymi@unimed.ac.id² mentaripurba9@gmail.com³

Abstract

This journal aims to analyze trade policies implemented during the Prabowo Subianto administration and how market interventions in the food sector impact Indonesia's political economy. This research uses a descriptive-analytical approach and collects data from various sources, including food commodity trade data, government-issued trade policies, reports from the Ministries of Agriculture and Trade, and various relevant academic studies. In analyzing market interventions, this study also considers the political and social factors influencing trade policies. The government has taken several strategic steps to achieve food self-sufficiency through protectionist trade policies, such as restricting imports of rice and other strategic commodities, strengthening the role of state-owned enterprises (SOEs) in food distribution, implementing reference prices to stabilize domestic prices, and providing incentives for farmers and local food processing industries. These interventions mark a shift in policy orientation from export-based downstreaming to domestic production-based food security.

Keywords: Trade Policy, Market Intervention, Food Self-sufficiency

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perdagangan yang diterapkan selama era kepemimpinan Prabowo Subianto dan bagaimana intervensi pasar dalam sektor pangan mempengaruhi ekonomi politik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk data perdagangan komoditas pangan, kebijakan perdagangan yang diterbitkan oleh pemerintah, laporan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, serta berbagai studi akademik yang relevan. Dalam menganalisis intervensi pasar, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor politik dan sosial yang mempengaruhi kebijakan perdagangan. Pemerintah melakukan beberapa langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan melalui kebijakan perdagangan proteksionis, seperti pembatasan impor beras dan komoditas strategis lainnya, penguatan peran BUMN dalam distribusi pangan, penerapan harga referensi untuk stabilisasi harga domestik, dan pemberian insentif bagi petani serta industri pengolahan pangan lokal. Intervensi ini menandai pergeseran orientasi kebijakan dari hilirisasi berbasis ekspor menuju ketahanan pangan berbasis produksi domestik.

Kata Kunci: Kebijakan Perdagangan, Intervensi Pasar, Swasembada Pangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Ekonomi politik kebijakan perdagangan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan perdagangan yang tepat dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dimulai Oktober 2024, pemerintah Indonesia menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam visi Asta Cita (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024). Pemerintah melakukan intensifikasi intervensi pasar untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Intervensi pasar merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatur dan mempengaruhi mekanisme pasar untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Melalui intervensi

pasar, pemerintah dapat mengontrol harga, produksi, dan distribusi komoditas strategis, khususnya pangan. Dalam konteks kebijakan perdagangan, intervensi pasar dilakukan melalui berbagai instrumen seperti pembatasan impor, penetapan harga referensi, subsidi produksi, penguatan peran BUMN, dan program stimulus permintaan domestik (Badan Ketahanan Pangan, 2025). Pemerintah Prabowo menargetkan swasembada beras pada akhir 2025 atau paling lambat 2026, dengan komitmen tidak melakukan impor terhadap empat komoditas strategis yaitu beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi sepanjang 2025. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah memerintahkan Bulog menyerap hasil panen petani dengan target 3 juta ton setara beras dan pengadaan jagung 1-2 juta ton, dengan total anggaran mencapai Rp39 triliun (Badan Pusat Statistik, 2025).

Salah satu program unggulan yang menjadi stimulus permintaan domestik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18, 2025). Program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan alokasi anggaran Rp71 triliun, menargetkan 19,47 juta penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hingga Agustus 2025, program ini telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak serta UMKM. Program MBG tidak hanya bertujuan mengatasi stunting, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme intervensi pasar yang mendorong produksi pangan lokal Suryana (2025). Namun, kebijakan proteksionisme ini juga menimbulkan tantangan seperti distorsi harga, ketidakefisienan alokasi sumber daya, dan potensi konflik dengan komitmen perdagangan internasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk ketahanan pangan pada 2025, meningkat 21,9 persen dari tahun sebelumnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan swasembada pangan sebagai program prioritas (Kementerian Pertanian, 2025). Penelitian ini menganalisis intervensi pasar pada era Presiden Prabowo Subianto dan dampaknya terhadap kebijakan perdagangan Indonesia dalam konteks swasembada pangan. Beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab: Bagaimana bentuk dan mekanisme intervensi pasar yang diterapkan dalam sektor pangan? Apa dampak kebijakan proteksionisme terhadap produksi domestik dan kesejahteraan petani? Bagaimana program Makan Bergizi Gratis berfungsi sebagai instrumen intervensi pasar? Serta bagaimana kebijakan ini mempengaruhi dinamika ekonomi politik Indonesia dalam konteks perdagangan internasional?

Kajian Teoritis

Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan merupakan seperangkat instrumen dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur aliran barang dan jasa antara negara domestik dengan negara lain. Menurut Krugman, P. R., & Obstfeld (2018), kebijakan perdagangan bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing industri domestik, dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas neraca perdagangan. Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan perdagangan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan efisiensi ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan kelompok tertentu, dan tujuan strategis nasional (Gilpin, 2001). Terdapat dua pendekatan utama dalam kebijakan perdagangan: liberalisme perdagangan yang mendorong perdagangan bebas dengan minimalisasi hambatan tarif dan non-tarif, serta proteksionisme yang mengutamakan perlindungan terhadap industri domestik melalui berbagai bentuk intervensi pemerintah. Instrumen kebijakan perdagangan dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, instrumen tarif berupa pajak yang dikenakan pada barang impor untuk meningkatkan harga barang tersebut di pasar domestik. Kedua,

instrumen non-tarif yang meliputi kuota impor, lisensi impor, subsidi ekspor, standar teknis, dan hambatan administratif lainnya. Dalam konteks negara berkembang, kebijakan perdagangan sering digunakan sebagai alat untuk mencapai industrialisasi, ketahanan ekonomi, dan kedaulatan atas sektor-sektor strategis.

Intervensi Pasar

Intervensi pasar adalah tindakan pemerintah yang secara aktif mempengaruhi mekanisme pasar dengan tujuan mencapai hasil ekonomi dan sosial yang diinginkan. Stiglitz, (1989) berpendapat bahwa intervensi pasar diperlukan ketika mekanisme pasar bebas mengalami kegagalan pasar (market failure) seperti eksternalitas, ketidaksempurnaan informasi, barang publik, dan kekuatan monopoli. Dalam sektor pangan, kegagalan pasar dapat terjadi karena sifat komoditas pangan yang strategis, volatilitas harga yang tinggi, dan ketidakpastian produksi akibat faktor iklim. Terdapat beberapa bentuk intervensi pasar yang umum diterapkan oleh pemerintah. Pertama, kontrol harga melalui penetapan harga dasar (floor price) untuk melindungi produsen atau harga maksimum (ceiling price) untuk melindungi konsumen. Kedua, manajemen stok strategis melalui lembaga pemerintah seperti Bulog untuk menstabilkan pasar. Ketiga, subsidi produksi atau konsumsi untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu. Keempat, regulasi perdagangan melalui pembatasan impor atau promosi ekspor (Timmer, 2015). Dalam perspektif ekonomi politik, intervensi pasar mencerminkan konflik antara efisiensi ekonomi dan tujuan distribusi serta stabilitas sosial. World Bank (2008) mencatat bahwa intervensi pasar di sektor pangan sering dimotivasi oleh tiga tujuan utama: (1) menjamin ketahanan pangan nasional, (2) melindungi pendapatan petani, dan (3) menjaga stabilitas harga konsumen. Namun, intervensi pasar yang berlebihan dapat menimbulkan distorsi ekonomi, biaya fiskal yang tinggi, rent-seeking, dan inefisiensi alokasi sumber daya.

Swasembada Pangan

Swasembada pangan didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dari produksi domestik tanpa ketergantungan signifikan pada impor. FAO (1996) membedakan konsep swasembada pangan dengan ketahanan pangan (food security), di mana ketahanan pangan lebih menekankan pada akses fisik, ekonomi, dan sosial terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, sedangkan swasembada lebih fokus pada kapasitas produksi domestik. Menurut Timmer (2015) terdapat tiga dimensi penting dalam swasembada pangan: Pertama, dimensi ketersediaan (availability) yang berkaitan dengan produksi dan pasokan pangan domestik. Kedua, dimensi aksesibilitas (accessibility) yang menyangkut kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan secara fisik dan ekonomi. Ketiga, dimensi pemanfaatan (utilization) yang berkaitan dengan kualitas dan keamanan pangan serta status gizi masyarakat. Strategi pencapaian swasembada pangan umumnya melibatkan kombinasi kebijakan: intensifikasi pertanian melalui peningkatan produktivitas, ekstensifikasi melalui perluasan lahan pertanian, diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas, dan proteksi perdagangan untuk melindungi petani domestik dari kompetisi impor. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam program swasembada pangan, dengan keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984 yang kemudian menghadapi berbagai tantangan keberlanjutan. Dalam konteks ekonomi politik, program swasembada pangan sering menjadi arena kontestasi antara berbagai kepentingan: petani yang menginginkan harga tinggi dan proteksi, konsumen yang menginginkan harga terjangkau, industri pengolahan yang membutuhkan pasokan stabil, dan pedagang yang berkepentingan pada liberalisasi perdagangan (Kementerian Pertanian, 2025). Keberhasilan

swasembada pangan memerlukan koordinasi kebijakan yang komprehensif meliputi investasi infrastruktur, riset dan pengembangan teknologi pertanian, reformasi kelembagaan, dan kebijakan perdagangan yang mendukung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang melibatkan analisis teks dan dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis bentuk dan mekanisme intervensi pasar pada era Presiden Prabowo Subianto, dampak kebijakan proteksionisme terhadap produksi domestik dan kesejahteraan petani, serta fungsi Program Makan Bergizi Gratis sebagai instrumen intervensi pasar dalam konteks swasembada pangan. Sumber data berasal dari dokumen kebijakan pemerintah (peraturan presiden dan dokumen Asta Cita), data statistik resmi BPS dan kementerian terkait, laporan Program MBG dan kinerja Bulog, jurnal ilmiah terindeks, serta publikasi media terpercaya. Penggunaan sumber data terverifikasi menjamin keandalan dan keakuratan informasi penelitian. Sumber data untuk penelitian ini akan berasal dari jurnal-jurnal ilmiah terpercaya yang memiliki kredibilitas akademik. Jurnal-jurnal tersebut akan mencakup artikel-artikel yang membahas konsep teoritis (merkantilisme baru, kebijakan harga pertanian, dan kedaulatan pangan) dan menghubungkannya dengan mekanisme intervensi pasar seperti pembatasan impor, penyerapan hasil panen Bulog, dan Program MBG. Penggunaan jurnal-jurnal ilmiah yang terverifikasi akan memastikan keandalan dan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang ekonomi politik kebijakan perdagangan era Prabowo dan efektivitas intervensi pasar dalam mendukung swasembada pangan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Mekanisme Intervensi Pasar dalam Sektor Pangan

Pemerintahan Prabowo Subianto menerapkan intervensi pasar yang komprehensif melalui beberapa mekanisme strategis untuk mencapai target swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam visi Asta Cita. Bentuk intervensi pertama adalah pembatasan impor terhadap empat komoditas strategis yaitu beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi sepanjang tahun 2025, yang mencerminkan implementasi prinsip merkantilisme baru dalam melindungi produksi domestik dari kompetisi global. Kebijakan moratorium impor ini merupakan langkah radikal yang menandai pergeseran fundamental dari pendekatan liberalisasi perdagangan menuju proteksionisme yang mengutamakan kemandirian ekonomi nasional. Pembatasan impor ini tidak hanya berfungsi sebagai proteksi langsung terhadap petani domestik, tetapi juga sebagai sinyal politik yang kuat tentang komitmen pemerintah terhadap kedaulatan pangan dan penolakan terhadap ketergantungan pada pasokan pangan impor yang rentan terhadap volatilitas harga global dan ketidakpastian geopolitik.

Mekanisme kedua adalah penguatan peran BUMN, khususnya Bulog, yang diberikan mandat strategis untuk menyerap hasil panen petani dengan target 3 juta ton setara beras dan pengadaan jagung 1-2 juta ton, didukung oleh alokasi anggaran mencapai Rp39 triliun. Kebijakan ini sejalan dengan teori kebijakan harga pertanian Timmer yang menekankan peran krusial lembaga pemasaran pemerintah dalam menstabilkan harga dan melindungi pendapatan petani melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Bulog dalam hal ini berfungsi sebagai buyer of last resort yang menjamin bahwa produksi petani akan terserap dengan harga yang layak, mengurangi risiko kelebihan pasokan yang dapat menekan harga di tingkat petani. Mekanisme penyerapan ini juga menciptakan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi karena adanya kepastian pasar. Selain itu, pemerintah menerapkan penetapan harga referensi untuk stabilisasi harga domestik dan memberikan subsidi produksi

serta insentif fiskal kepada petani dan industri pengolahan pangan lokal, yang meliputi subsidi pupuk, benih unggul, teknologi pertanian, serta kemudahan akses pembiayaan. Kombinasi dari mekanisme intervensi ini menciptakan ekosistem kebijakan yang saling memperkuat untuk mendorong pencapaian swasembada pangan melalui peningkatan kapasitas produksi domestik dan penguatan posisi petani dalam struktur ekonomi politik nasional.

Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Intervensi Pasar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 merupakan inovasi kebijakan yang berfungsi sebagai instrumen intervensi pasar multidimensional dengan pendekatan yang mengintegrasikan tujuan sosial, ekonomi, dan politik dalam satu program komprehensif. Dengan alokasi anggaran Rp71 triliun dan mencapai 20 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025, program ini tidak hanya bertujuan mengatasi stunting dan malnutrisi, tetapi juga menciptakan stimulus permintaan domestik yang signifikan terhadap produksi pangan lokal. Dampak ekonomi dari Program MBG sangat substansial dengan terciptanya 290.000 lapangan kerja baru dan keterlibatan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM dalam rantai pasokan pangan program. Mekanisme pengadaan pangan untuk Program MBG yang mengutamakan sumber lokal secara efektif berfungsi sebagai *guaranteed market* bagi produk pertanian domestik, mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi penghambat utama bagi petani untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi. Dalam konteks teori *public procurement* sebagai instrumen kebijakan, Program MBG menunjukkan bagaimana pengadaan oleh pemerintah dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Pengadaan pangan untuk 20 juta penerima manfaat setiap hari menciptakan permintaan yang sangat besar dan stabil terhadap berbagai komoditas pangan lokal, memberikan sinyal yang jelas kepada petani tentang kebutuhan pasar dan memungkinkan mereka untuk merencanakan produksi dengan lebih baik. Dalam perspektif teori kedaulatan pangan, Program MBG memperkuat kontrol negara atas sistem pangan nasional dengan memastikan bahwa kebutuhan pangan untuk program sosial strategis dipenuhi dari produksi domestik, mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan global yang rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan rantai pasokan internasional. Program ini juga menciptakan *leverage* politik bagi pemerintah dalam negosiasi perdagangan internasional dan berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi yang progresif, dimana anggaran negara digunakan untuk membeli produk dari petani kecil dan UMKM lokal, kemudian didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga menciptakan sirkulasi ekonomi yang memperkuat basis produksi domestik sambil meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dampak Kebijakan Proteksionisme terhadap Produksi Domestik dan Kesejahteraan Petani

Kebijakan proteksionisme yang diterapkan pemerintah Prabowo memberikan dampak signifikan terhadap produksi domestik dan kesejahteraan petani dengan berbagai kompleksitas yang perlu dikelola. Dampak positif yang paling langsung adalah terciptanya ruang pasar yang lebih besar bagi produksi domestik melalui pembatasan impor, yang mengurangi kompetisi dari produk impor bersubsidi atau berskala ekonomi besar dari negara lain. Mekanisme penyerapan hasil panen oleh Bulog dengan HPP yang menguntungkan memberikan jaminan pendapatan stabil bagi petani, mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga musiman. Komitmen anggaran ketahanan pangan sebesar Rp139,4 triliun pada 2025, meningkat 21,9 persen dari tahun sebelumnya, dialokasikan untuk subsidi input produksi, pembangunan infrastruktur pertanian, penelitian dan pengembangan, serta program penyuluhan dan pembiayaan yang diharapkan dapat mengatasi kendala struktural dalam

meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Program MBG yang melibatkan 1 juta petani menciptakan pasar terjamin dan berkelanjutan, memberikan kepastian yang mengurangi risiko dan mendorong investasi jangka panjang dalam peningkatan kapasitas produksi. Petani yang terlibat mendapatkan akses ke pendampingan teknis, standarisasi kualitas, dan pembayaran tepat waktu yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi. Dampak multiplier juga dirasakan oleh sektor terkait seperti industri pengolahan, transportasi, dan perdagangan lokal, menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah pedesaan. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan serius yang memerlukan pengelolaan strategis. Pertama, pembatasan impor dapat menyebabkan distorsi harga dimana harga domestik naik di atas harga internasional, memberikan beban bagi konsumen berpendapatan rendah dan meningkatkan biaya fiskal untuk subsidi. Kedua, proteksi berkepanjangan dapat menciptakan inefisiensi dan mengurangi insentif peningkatan produktivitas karena petani terlindungi dari kompetisi, fenomena yang dikenal sebagai "protectionism trap". Ketiga, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan komitmen WTO dan perjanjian perdagangan internasional, dimana negara pengekspor dapat mengajukan gugatan atau melakukan retaliasi perdagangan yang merugikan ekspor Indonesia di sektor lain. Keempat, keberhasilan jangka panjang bergantung pada peningkatan produktivitas pertanian yang substansial melalui adopsi teknologi modern, perbaikan irigasi, dan modernisasi praktik pertanian, bukan hanya pada proteksi perdagangan semata.

Dinamika Ekonomi Politik dalam Konteks Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan era Prabowo mencerminkan pergeseran paradigma yang fundamental dari orientasi hilirisasi berbasis ekspor menuju ketahanan pangan berbasis produksi domestik, menempatkan Indonesia dalam posisi kompleks dalam dinamika perdagangan global. Penerapan proteksionisme terhadap komoditas strategis menandai adopsi pendekatan merkantilisme baru yang mengutamakan kedaulatan ekonomi dan kemandirian pangan atas prinsip efisiensi pasar bebas. Kebijakan ini mencerminkan kontestasi kepentingan antara berbagai aktor ekonomi politik, dimana petani dan BUMN mendukung proteksi untuk melindungi pendapatan dan pangsa pasar, sementara konsumen dan industri pengolahan menghadapi potensi kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan impor murah, dan importir kehilangan peluang bisnis dari perdagangan komoditas pangan. Dalam konteks perdagangan internasional, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketegangan dengan mitra dagang yang berkepentingan mengeksport komoditas pangan ke Indonesia. Negara-negara seperti Thailand, Vietnam, India (beras), Argentina, Brasil (jagung), dan Australia (gula) yang selama ini merupakan pemasok utama dapat menggunakan mekanisme bilateral maupun multilateral untuk menekan Indonesia membuka kembali akses pasar. Risiko retaliasi perdagangan terhadap produk ekspor unggulan Indonesia seperti minyak sawit, karet, tekstil, dan produk manufaktur merupakan konsekuensi yang harus diantisipasi dengan strategi diplomasi ekonomi yang efektif. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara komitmen terhadap swasembada pangan dengan pemeliharaan hubungan perdagangan yang kondusif dengan mitra dagang utama.

Target swasembada beras pada akhir 2025 atau paling lambat 2026 menunjukkan ambisi politik yang kuat dan menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan visi Asta Cita. Namun, pencapaian target ini memerlukan peningkatan produksi beras domestik yang sangat signifikan, mengingat konsumsi beras nasional mencapai sekitar 29-30 juta ton per tahun sementara produksi masih berkisar 31-32 juta ton dengan kualitas yang bervariasi. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi yang berkualitas, ditambah dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi, membuat target swasembada

menjadi sangat menantang. Implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi yang sangat ketat antara berbagai kementerian dan lembaga, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program di lapangan. Keberhasilan jangka panjang juga bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjaga konsistensi kebijakan meskipun menghadapi tekanan dari berbagai kelompok kepentingan domestik maupun internasional, serta fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian strategi berdasarkan evaluasi implementasi dan perubahan kondisi ekonomi global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto menerapkan intervensi pasar komprehensif melalui pembatasan impor empat komoditas strategis, penguatan Bulog dengan anggaran Rp39 triliun, dan subsidi produksi yang mencerminkan merkantilisme baru untuk mencapai kedaulatan pangan. Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp71 triliun berfungsi sebagai instrumen multidimensional yang menciptakan 290.000 lapangan kerja, melibatkan 1 juta petani, dan menghasilkan pasar terjamin bagi produksi domestik. Kebijakan proteksionisme memberikan dampak positif berupa perlindungan pasar, jaminan pendapatan petani, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan dengan dukungan anggaran Rp139,4 triliun, namun menghadapi tantangan distorsi harga, risiko inefisiensi, konflik WTO, dan ancaman retaliasi perdagangan. Keberhasilan target swasembada beras 2025-2026 bergantung pada peningkatan produktivitas pertanian, koordinasi kebijakan, dan diplomasi ekonomi yang menyeimbangkan kedaulatan pangan dengan hubungan perdagangan internasional.

Pemerintah perlu memprioritaskan investasi jangka panjang dalam peningkatan produktivitas pertanian melalui penelitian varietas unggul, modernisasi irigasi, dan teknologi pertanian modern, serta mengembangkan exit strategy bertahap untuk menghindari protectionism trap. Diperlukan penguatan monitoring Program MBG, pengembangan mekanisme dual pricing untuk melindungi konsumen berpendapatan rendah, dan intensifikasi diplomasi ekonomi untuk meminimalkan risiko retaliasi perdagangan serta memperjuangkan fleksibilitas kebijakan ketahanan pangan di forum WTO. Pemerintah harus mengintensifkan program penyuluhan dan pendampingan petani untuk meningkatkan kapasitas manajerial serta memfasilitasi akses pembiayaan dan asuransi pertanian. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif diperlukan untuk mengukur dampak ekonomi kebijakan, analisis cost-benefit Program MBG, dan studi komparatif dengan negara lain yang berhasil mencapai swasembada pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan, K. P. (2025). Laporan Kinerja Program Ketahanan Pangan Tahun 2025.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Statistik Indonesia: Produksi Padi Nasional Tahun 2024-2025.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (1996). Rome Declaration on World Food Security.
- Gilpin, R. (2001). Global Political Economy: Understanding the International Economic Order.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2024). Kebijakan Swasembada Pangan dalam Visi Asta Cita.
- Kementerian Pertanian (2025). Roadmap Swasembada Pangan 2025-2026.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2018). International Economics: Theory and Policy (11th ed.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18. (2025). Program Makan Bergizi Gratis.
- Stiglitz, J. E. (1989). "Markets, Market Failures, and Development." *American Economic Review*, 79(2), 197-203.

- Suryana, A. (2025). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123–135.
- Timmer, C. P. (2015). *Food Security and Scarcity: Why Ending Hunger Is So Hard*.
- World Bank. (2008). *Agriculture for Development: World Development Report 2008*.